

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional pada dasarnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya yang mengutamakan kemajuan. Adapun kemajuan suatu bangsa tidak terlepas dari kemajuan pribadi manusia itu sendiri, dengan kata lain kemajuan suatu bangsa akan ditentukan oleh pribadi manusia yang ada dalam bangsa tersebut. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut salah satu upaya yang paling mendasar dalam rangka mengembangkan potensi bangsa adalah melalui jalur pendidikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan di Indonesia dibagi dalam 3 jalur sebagaimana tercantum dalam UU SISDIKNAS No 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan terbagi dalam 3 jalur yaitu jalur formal, non formal, dan informal. Djudju Sudjana (2000 : 22-23) dijelaskan bahwa pendidikan nonformal ialah kegiatan terorganisir dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting

dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan nonformal dan informal sangat ditentukan oleh dukungan dan peran serta masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan secara tidak langsung akan memberikan keleluasaan bagi masyarakat dalam menentukan masa depannya, sehingga masyarakat menjadi semakin mandiri. Masyarakat merupakan sumber inspirasi, kreatifitas dan ilmu yang tidak pernah kering. Masyarakat dengan segala dinamikanya terus berubah dan berkembang setiap saat. Bentuk konkrit dapat terlihat dari lahirnya kesadaran bahwa masyarakat merupakan suatu potensi besar yang mampu untuk membangun dirinya sendiri.

Pendidikan non formal memiliki satuan jenis yaitu kursus dan pelatihan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), majlis ta'lim, kelompok bermain, dan satuan jenis lainnya. PKBM adalah suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi dan budaya.

Sebagaimana ditegaskan di dalam Standar Minimal Manajemen (SMM) PKBM berbasis masyarakat (2001 : 1) bahwa Tujuan PKBM adalah memperluas kesempatan warga masyarakat, khususnya yang tidak mampu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan bekerja mencari nafkah.

PKBM digulirkan pada tahun 1994, sejak itu pemerintah berupaya terus meningkatkan kualitas layanan PKBM. Sampai dengan akhir tahun 2010 jumlah PKBM tercatat 4674 lembaga (Database NILEM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat DIKMAS 2010). Diharapkan jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan luasnya sasaran layanan PNF dan semakin bervariasinya jenis keterampilan yang dibutuhkan masyarakat. Untuk itu PKBM dituntut untuk terus dapat mengembangkan program-programnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bertambahnya jumlah PKBM di Jawa Barat pada tahun 2010 mencapai 1613 PKBM yang tercatat di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Tercatat di Kota Cimahi sebanyak 24 PKBM namun belum diketahui seberapa banyak yang layak dikategorikan sebagai PKBM.

Semakin bertambahnya jumlah PKBM secara kuantitatif menunjukkan indikasi perkembangan yang positif, namun diutamakan tingkat efektifitas penyelenggaraan program-programnya. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2001 melalui BPKB Jayagiri dengan UNESCO mengembangkan sebuah standar untuk pengendalian dan pencapaian kualitas program PKBM yang diberi nama Standar Minimal Manajemen PKBM.

Walaupun secara menejerial telah dibukukan standar pengelola menyelenggarakan PKBM, namun berdasarkan hasil studi pendektan masih terdapat pengelola PKBM yang belum mengetahui SMM, bahkan ada yang sudah mengetahui namun belum menerapkannya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan SMM pada PKBM di Kota Cimahi.

B. Identifikasi Masalah

1. Dewasa ini secara kuantitas PKBM semakin tumbuh subur lulusannya, di Kota Cimahi hingga tahun 2010 berjumlah 23 PKBM, namun masih dipertanyakan kualitas penyelenggaraan programnya.
2. Berdasarkan kendala yang berhasil diidentifikasi dalam pengelolaan PKBM, yaitu lemahnya Sumber Daya Manusia pengelola PKBM, kurangnya pemahaman para pengelola tentang proses pengelolaan PKBM, kesulitan dalam mengakses informasi dan jaringan kemitraan, juga sarana dan prasarana yang kurang memadai.
3. Sejak tahun 2001 Standar Minimal Manajemen (SMM) PKBM, telah disusun dan disosialisasikan, namun sampai saat ini kecenderungannya diragukan pemahaman dan penerapannya.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan sesuai dengan kemampuan peneliti, maka penelitian ini dibatasi pada masalah:

1. Implementasi SMM dalam pengelolaan PKBM di kota Cimahi
2. Kendala yang dihadapi dalam menerapkan SMM pada PKBM di kota Cimahi
3. Efektifitas SMM terhadap program PKBM di kota Cimahi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Sebagai bahan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama pendidikan luar sekolah

2. Manfaat praktisi

Sebagai bahan pemikiran bagi para pengelola dan lebih lanjut untuk menciptakan suatu bentuk pendidikan yang relevan dalam peningkatan program PKBM dan sebagai bahan informasi bagi yang membutuhkan literatur tentang SMM dalam program PKBM

E. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana implementasi SMM dalam pengelolaan PKBM di kota Cimahi ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam menerapkan SMM pada PKBM di kota Cimahi?
3. Apakah program PKBM dapat diselenggarakan secara efektif dengan diterapkannya SMM PKBM di Kota Cimahi?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi SMM dalam pengelolaan PKBM di kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi PKBM di Kota Cimahi dalam menerapkan SMM.
3. Untuk mengetahui efektifitas SMM terhadap program PKBM di Kota Cimahi.

G. Definisi Operasional

1. Secara etimologis implementasi dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/03/teori-implementasi-kebijakan-publik.html>
2. Standar Minimal Manajemen, menguraikan kegiatan minimal yang perlu dilakukan oleh pengelola PKBM agar fungsi PKBM dapat dilaksanakan. Kegiatan pengelolaannya diuraikan berdasarkan tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, dan penilaian. SMM PKBM berbasis masyarakat (2001 : 7)
3. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah suatu wadah yang menyediakan informasi kegiatan belajar sepanjang hayat bagi setiap warga masyarakat agar mereka lebih berdaya. Wadah ini adalah milik masyarakat dikelola, dari, oleh, dan untuk masyarakat masyarakat. (Panduan Penyelenggaraan PKBM 2006 :1 membangun PKBM)

H. Anggapan Dasar

1. PKBM sebagai salah satu kelembagaan yang menitikberatkan pada menurut Dr. Umberto Sihombing (Fasli Jalal dan Dedi Supriadi 2001:187) pendidikan berbasis masyarakat yang menekankan pentingnya pemahaman akan kebutuhan masyarakat dan cara pemecahan masalah oleh masyarakat dengan menggunakan potensi yang ada di lingkungannya.

2. Secara umum PKBM di bentuk dengan tujuan untuk memperluas kesempatan warga masyarakat khususnya yang tidak mampu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan bekerja mencari nafkah.

(BPKB Jayagiri dan UNESCO 2001:1)

3. PKBM yang dikelola oleh masyarakat, terbentuk dan terselenggara berdasarkan standar kepentingan dan kemampuan pemerintah, bukan didasarkan kepada standar kepentingan dan kemampuan masyarakat, maka salah satunya perlu dikembangkan standar minimal manajemen penyelenggaraan PKBM yang berbasis masyarakat (*community based*).

(BPKB Jayagiri dan UNESCO 2001:5)

4. Menurut Djudju Sudjana (Mustofa Kamil 2009:118) bahwa manajemen program PKBM dalam pengembangannya, bisa mengacu pada manajemen yang dikembangkan pada konsep manajemen pendidikan luar sekolah, yang berupaya menerapkan fungsi-fungsi pengelolaan baik untuk setiap kegiatan yang berkaitan dengan kelembagaan pendidikan luar sekolah maupun untuk satuan pendidikan luar sekolah.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengurutkan sistematika penulisan skripsi yang terdiri atas :

BAB I, Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, definisi operasional, anggapan dasar serta sistematika penulisan.

BAB II, Kajian Teoritis yang berhubungan dengan masalah penelitian seperti pengertian manajemen, fungsi manajemen, teori perencanaan, teori pengorganisasian, teori pelaksanaan dan teori penilaian.

BAB III, Metodologi Penelitian, membahas mengenai metode penelitian, dan alat pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, penyusunan alat pengumpul data, prosedur pengolahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV, Hasil penelitian meliputi gambaran objektif daerah penelitian, gambaran pengelolaan PKBM di kota cimahi, pemahaman pengelola dalam penyelenggaraan PKBM, dan bagaimana penerapan SMM pada tiap-tiap PKBM

BAB V, Kesimpulan dan Saran, membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan beberapa saran yang patut diberikan berdasarkan penelitian.